

**KOMPARASI KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT PADA OPINI *DISCLAIMER* DAN WDP**

*COMPARATIVE FINANCIAL PERFORMANCE OF WEST HALMAHERA DISTRICT GOVERNMENT ON *DISCLAIMER* AND WDP OPINION*

Oleh:

**Erick H. Takawalude<sup>1</sup>**  
**Parengkuan Tommy<sup>2</sup>**  
**Joubert B. Maramis<sup>3</sup>**

**Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Manajemen**  
**Universitas Sam Ratulangi Manado**

Email:

[1ericktakawalude26@gmail.com](mailto:ericktakawalude26@gmail.com)

[2parengkuantommy@yahoo.com](mailto:parengkuantommy@yahoo.com)

[3barensmaramis@yahoo.com](mailto:barensmaramis@yahoo.com)

**Abstrak :** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan kinerja keuangan pemerintah daerah periode opini *Disclaimer* dan kinerja keuangan pemerintah daerah periode opini WDP pada kabupaten halmahera barat. penelitian dilakukan pada satu kabupaten yang mengalami peningkatan penerimaan opini dari *Disclaimer* menjadi WDP. data penelitian ini adalah laporan anggaran dan realisasi APBD pada kabupaten halmahera barat. Oleh karena itu, sebanyak delapan laporan keuangan APBD dari tahun 2008 sampai 2015 akan dijadikan data analisis penelitian ini. Teknik analisis data menggunakan Analisis Uji Beda (Paired t Test). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah periode opini *Disclaimer* tidak berbeda dengan kinerja keuangan pemerintah daerah periode opini WDP pada kabupaten halmahera barat.

**Kata kunci :** *Kinerja Keuangan, Rasio Keuangan Daerah, dan Opini Audit.*

**Abstract :** *This study aims to identify the difference in local government financial performance *Disclaimer* opinion period and local government financial performance period WDP opinion in West halmahera regency. The study was conducted in one district that experienced an increase in opinion acceptance from *Disclaimer* to WDP. This research data is the budget report and APBD realization in West halmahera district. Therefore, as many as eight reports of financial budget from 2008 to 2015 will be used as data to the analysis of this research. The technique of data using Analysis of Different Test (Paired t-Test). The results show that the performance of local government finances *Disclaimer* opinion period have not a significant different from the local government's financial performance period of WDP opinion in West Halmahera regency.*

**Keywords:** *Financial Performance, Regional Financial Ratios, and Audit Opinion.*

---

**PENDAHULUAN****Latar Belakang**

Tujuan Negara Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD RI Tahun 1945 alinea IV adalah “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial”. Untuk mencapai tujuan tersebut, Negara membentuk suatu organisasi yaitu pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang diberi tugas dan wewenang mewujudkan, mengatur dan melayani segala sesuatu yang berhubungan dengan kepentingan rakyat.

Maka untuk mencapai tujuan suatu negara diperlukan adanya pembiayaan dengan sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan, dan efisien. Pembiayaan suatu daerah diperoleh dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang disusun setiap tahun oleh pemerintah daerah beserta satuan kerjanya untuk memenuhi kebutuhan publik (Agustina: 2013).

UU Nomor 17 Tahun 2003 menetapkan bahwa laporan keuangan pemerintah pada gilirannya harus diaudit oleh (BPK) merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern. Dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, maka setiap pemerintah daerah tentu mengharapkan opini tertinggi dari BPK RI. Opini audit dapat menaikkan atau menurunkan tingkat kepercayaan publik atas pelaporan yang disajikan oleh pemerintah daerah. Semakin baik opini yang diterima oleh pemerintah daerah, maka semakin baik pula kinerja pemerintah tersebut dalam penyajian laporan keuangannya (Wendy, 2012).

Dan Tahun opini audit BPK terhadap kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat, Opini *Disclaimer* (TMP) yaitu dari tahun 2008-2011 ada ruang lingkup audit yang dibatasi oleh perusahaan/pemerintah yang diaudit, karena auditor tidak bisa memperoleh bukti-bukti yang dibutuhkan untuk bisa menyimpulkan dan menyatakan laporan sudah disajikan dengan wajar, Kemudian mendapatkan Opini *qualified opinion* (WDP) dari BPK yaitu dari tahun 2012-2015 opini audit yang diterbitkan jika sebagian besar informasi dalam laporan keuangan bebas dari salah saji material, kecuali untuk rekening atau item tertentu yang menjadi pengecualian.

Pengukuran kinerja sangatlah penting terutama dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah untuk menilai akuntabilitas pemerintah. Kinerja keuangan pemerintah daerah adalah kemampuan suatu daerah untuk menggali dan mengelola sumber-sumber keuangan asli daerah dalam memenuhi kebutuhannya guna mendukung berjalannya sistem pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan daerahnya dengan tidak tergantung sepenuhnya kepada pemerintah pusat dan mempunyai keleluasaan di dalam menggunakan dana-dana untuk kepentingan masyarakat daerah dalam batas-batas yang ditentukan peraturan perundang-undangan (Syamsi, 1986,dalam Mariani (2013). Untuk menganalisa kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerahnya adalah melakukan analisa rasio keuangan terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakan seperti : Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal, Kemandirian, Efektivitas, Efisiensi, Aktivitas, Indeks Belanja Rutin dan Ketergantungan. Kemudian menggunakan Uji Beda *Paired (t Test)* pada opini *Disclaimer* dan WDP.

**Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat pada periode *Disclaimer* dan WDP.

**TINJAUAN PUSTAKA****Manajemen Keuangan**

Manajemen keuangan adalah salah satu fungsi manajemen terhadap segala aktivitas perusahaan yang berhubungan dengan kegiatan memperoleh sumber dana, menggunakan dana, dan manajemen aktiva untuk menciptakan kemakmuran bagi pemegang saham melalui maksimalisasi nilai perusahaan (Wachowicz Jr, 2012:2).

**Otonomi Daerah**

Berdasarkan UU No 32 Tahun 2004 Pasal 1 angka 5 memberikan definisi Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah**

Pengertian Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran daerah dengan kuantitas dan kualitas yang terukur, kemampuan daerah dapat diukur dengan menilai efisiensi atas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat (Mahmudi,2016).

**Tujuan Pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah**

Pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dilakukan untuk memenuhi 3 tujuan yaitu (Mardiasmo, 2011) :

1. Memperbaiki kinerja Pemerintah Daerah.
2. Membantu mengalokasikan sumber daya dan pembuatan keputusan.
3. Mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan.

**Grand Theory**

Grand theory adalah setiap teori yang dicoba dari penjelasan keseluruhan kehidupan sosial, sejarah, atau pengalaman manusia. Pada dasarnya berlawanan dengan empirisme, positivisme, atau pandangan bahwa pengertian hanya mungkin dilakukan dengan mempelajari fakta-fakta, masyarakat, dan fenomena. (Quenti Skinner, ed. *The Return of Grand Theory in the Human Sciences*, Cambridge, 1985).

**Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, komponen-komponen yang terdapat dalam suatu laporan keuangan pokok adalah Laporan Realisasi Anggaran mengungkapkan kegiatan keuangan pemerintah pusat/daerah yang menunjukkan ketaatan terhadap APBN/APBD.

**Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah**

Salah satu alat untuk menganalisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dalam mengelola keuangan daerahnya adalah dengan melakukan analisis keuangan terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakannya (Abdul Halim, 2012). Untuk menganalisis kemampuan keuangan yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, berbagai analisis rasio keuangan sebagai berikut:

1. Derajat Desentralisasi Fiskal

$$\text{Derajat Desentralisasi} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

## 2. Rasio Kemandirian

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{(\text{Transfer Pusat} + \text{Propinsi} + \text{Pinjaman})} \times 100 \%$$

## 3. Rasio Efektivitas

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

## 4. Rasio Efisiensi

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Belanja}}{\text{Realisasi Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

## 5. Rasio Aktivitas

$$\text{Rasio Belanja Rutin} = \frac{\text{Total Belanja Rutin}}{\text{Total APBD}} \times 100\%$$

$$\text{Rasio Belanja Modal} = \frac{\text{Total Belanja Pembangunan}}{\text{Total APBD}} \times 100\%$$

## 6. Rasio Indeks Kemampuan Rutin

$$\text{Indeks Kemampuan Rutin} = \frac{\text{PAD}}{\text{Total Pengeluaran Rutin}} \times 100\%$$

## 7. Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

$$\text{Rasio Ketergantungan} = \frac{\text{Pendapatan Transfer}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100 \%$$

**Opini Audit BPK**

Menurut UU Nomor 15 Tahun 2004, yang dimaksud dengan opini adalah pernyataan profesional sebagai kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan. Menurut Mulyadi (2002:20-22).

**Penelitian Terdahulu**

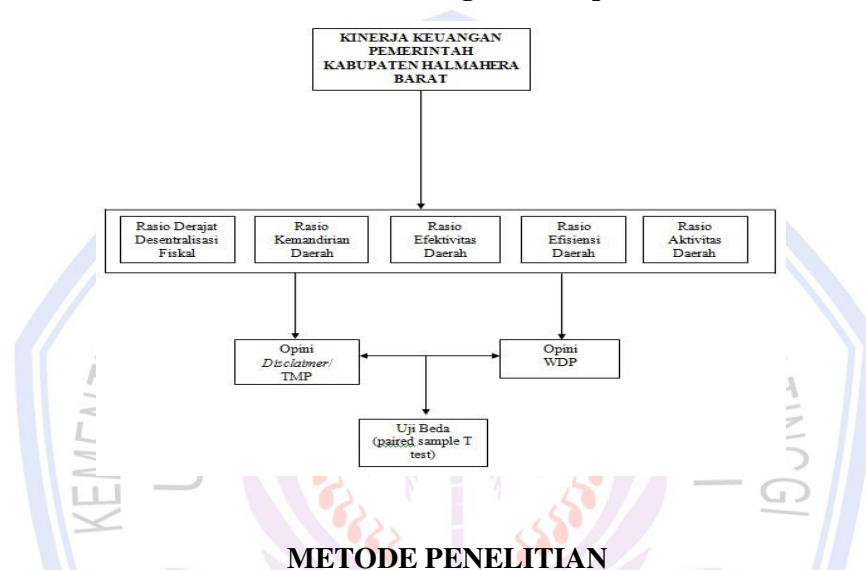
Mario Rainer Pangalila (2014) Dengan judul Analisis Komparasi Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Kota Beropini WDP Dan *Disclaimer* Yang Ada Di Sulut, Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan secara signifikan kinerja keuangan Daerah Kabupaten/Kota yang beropini WDP (wajar dengan pengecualian) dengan yang beropini *Disclaimer* yang ada di Sulawesi Utara. 2007-2011, Metode penelitian menggunakan

Deskriptif Kuantitatif. dari hasil uji hipotesis didapati tidak ada perbedaan antara kinerja keuangan daerah yang beropini WDP dan daerah yang beropini *Disclaimer*.

Muhammad Taufik(2014) Dengan judul Analisis Perbedaan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Periode Opini WDP dan Periode Opini WTP (Study Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh Tahun 2011-2012). Tujuan penelitian ini untuk menguji dan menganalisis perbedaan kinerja keuangan pemerintah daerah periode opini WDP dan kinerja keuangan pemerintah daerah periode opini WTP pada kabupaten/kota di Provinsi Aceh tahun 2011-2012. Metode Penelitian sensus, Statistik Deskriptif,dan Paired Sample T test. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah periode opini WDP tidak berbeda dengan kinerja keuangan pemerintah daerah periode opini WTP pada kabupaten/kota di Provinsi Aceh tahun 2011-2012.

## Kerangka Konseptual

**Gambar 1. Kerangka Konseptual**



### Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan bersifat komparatif (perbandingan) yaitu bersifat menguraikan sifat-sifat dan keadaan sebenarnya dari dua atau lebih objek penelitian, yang kemudian dibandingkan guna mencari perbedaan antara kedua atau lebih objek yang diteliti (Sugiyono, 2000:11).

### Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan di Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat yang berlokasi di Jalan Pengabdian no. 1 jati porniti, Kecamatan jailolo, Kabupaten Halmahera Barat, Provinsi Maluku Utara pada bulan februari, maret dan april 2017

### Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah Data Laporan Keuangan dari tahun 2008-2015 dan Objek Penelitian adalah Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat.

### Teknik Pengumpulan Data

Penelitian dilakukan dengan pencarian data sekunder dengan mengumpulkan data dengan cara mempelajari catatan-catatan dan dokumen-dokumen yang ada pada perusahaan atau instansi yang diteliti dengan menggunakan metode dokumentasi.

Data umum :

1. Gambaran Umum Kabupaten Halmahera Barat
2. Gambaran Umum Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat

Data khusus :

1. Anggaran APBD dan Realisasi APBD tahun 2008-2015.

### Teknik Analisis

Teknik analisis hipotesis dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan analisis Uji Beda (Paired t Test). Analisis uji beda dilakukan untuk menguji satu sampel yang sama pada dua periode pengamatan yang berbeda yaitu periode opini *Disclaimer* dan periode opini WDP.

1. Berdasarkan perbandingan t hitung dengan t tabel:
  - Jika Statistik Hitung (angka t output) > Statistik Tabel (tabel t), maka Ho ditolak.
  - Jika Statistik Hitung (angka t output) < Statistik Tabel (tabel t), maka Ho diterima
2. Berdasarkan nilai Probabilitas:
  - Jika probabilitas > 0,05, maka Ho diterima.
  - Jika probabilitas < 0,05, maka Ho ditolak.
3. Untuk uji dua sisi, setiap sisi dibagi 2 hingga menjadi:
  - Angka probabilitas/2 > 0,025, maka Ho diterima.
  - Angka probabilitas/2 < 0,025, maka Ho ditolak.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Hasil Penelitian

Hasil analisis gabungan dan analisis rasio kinerja keuangan pemerintah kabupaten Halmahera Barat periode opini *Disclaimer* dan periode opini WDP dapat dilihat pada tabel 1, 2 dan 3

**Tabel 1.Paired Samples Test**

	Paired Differences					t	df	Sig. (2-tailed)
	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference				
				Lower	Upper			
Pair 1 <i>Disclaimer_gab - WDP_gab</i>	-3.09563	15.18393	2.68416	-8.57002	2.37877	-1.153	31	.258

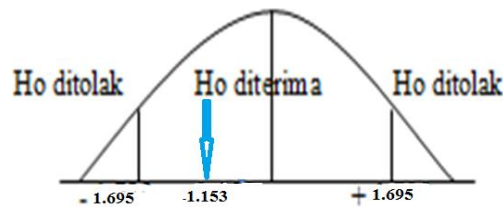
Sumber : Data diolah SPSS 22 (2017)

Berdasarkan Tabel 1. pada tabel Paired Samples Test diperoleh hasil berikut:

1. Berdasarkan perbandingan t hitung dengan t tabel:

Diperoleh nilai t hitung yaitu -0,1.153 sedangkan nilai t tabel (0,025;31) yaitu 1,695. Sehingga diperoleh kurva sebagai berikut:

**Gambar 2. Kurva Paired Sample Test**



Sumber : data diolah, 2017

Oleh karena t hitung terletak pada daerah Ho diterima, maka dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan periode opini *Disclaimer* dan kinerja keuangan periode opini WDP tidak berbeda.

- Berdasarkan Nilai Probabilitas : Paired Samples Test, bahwa nilai probabilitas (sig. adalah 0.258. Untuk uji dua sisi, nilai probabilitas (sig). adalah  $0.285/2 = 0.142 > 0.025$  maka Ho diterima. Hal ini menunjukkan bahwa Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat periode opini *Disclaimer* tidak berbeda dengan Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat pada periode opini WDP.

**Tabel 2. Analisis Rasio Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat Periode Opini *Disclaimer***

Tahun	Derajat Desentralisasi	Kemandirian Daerah	Efektivitas Daerah	Efisiensi Daerah	Rasio Aktivitas	Rasio Ideks Kemampuan Rutin	Rasio Ketergantungan	
Opini BPK	<i>Disclaimer</i>	<i>Disclaimer</i>	<i>Disclaimer</i>	<i>Disclaimer</i>	<i>Disclaimer</i>	<i>Disclaimer</i>	<i>Disclaimer</i>	
2008	1.94	1.98	48.84	107.27	66.15	33.69	2.80	98.05
2009	2.26	2.31	46.95	116.56	66.15	31.26	3.10	97.74
2010	2.2	2.25	49.95	113.28	57.53	42.46	3.80	97.79
2011	1.43	1.45	80.33	110.32	76.82	23.18	1.80	98.57
<b>Rata-Rata</b>	<b>1.95</b>	<b>1.99</b>	<b>56.51</b>	<b>111.85</b>	<b>66.66</b>	<b>32.65</b>	<b>2.88</b>	<b>98.03</b>

Sumber : Data diolah (2017)

**Tabel 3. Analisis Rasio Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat Periode Opini WDP**

Tahun	Derajat Desentralisasi	Kemandirian	Efektivitas	Efisiensi	Rasio	Rasio Ideks	Rasio	
		Daerah	Daerah	Daerah	Aktivitas	Kemampuan Rutin	Ketertgantungan	
Opini BPK	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP	
2012	1.44	1.43	75.3	110.29	76.10	23.40	1.80	98.58
2013	2.08	2.93	70.9	110.34	52.61	47.39	5.40	97.15
2014	2.7	2.77	111.34	114.1	53.33	46.66	5.40	97.3
2015	4.25	4.44	58.46	107.05	53.28	46.71	8.60	95.74
<b>Rata-Rata</b>	<b>2.61</b>	<b>2.89</b>	<b>79</b>	<b>110.44</b>	<b>58.83</b>	<b>41.04</b>	<b>5.30</b>	<b>97.19</b>

Sumber : Data diolah (2017)

### Analisis Parsial (Per Variabel)/Analisis Tambahan

Rasio Derajat Desentralisasi Berdasarkan hasil analisis pada tabel 2 dan 3 di atas dapat dilihat bahwa kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat jika dilihat dari Rasio Derajat Desentralisasi dikategorikan sangat kurang, karena dari tahun 2008-2015 hanya memiliki rata-rata pada periode opini *Disclaimer* dan WDP sebesar 1.95% dan 2.61% atau berada dalam skala Interval 00,00-10,00%.

Rasio Kemandirian Daerah Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel 2 dan 3 di atas kemampuan keuangan Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat tergolong masih sangat rendah dan pola hubungannya termasuk pola hubungan (instruktif) karena pada tahun 2008-2015 memiliki rata-rata pada periode opini *Disclaimer* dan WDP sebesar 1.99% dan 2.89%. ini dikatakan bahwa tingkat ketergantungan daerah pada periode opini *Disclaimer* dan WDP terhadap pihak ekstern sangat tinggi. Karena Berada dalam skala interval (00%-25%).

Rasio Efektivitas Daerah Berdasarkan perhitungan pada tabel 2 dan 3 di atas dapat diketahui bahwa Efektivitas Keuangan Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat pada tahun 2008, 2009, 2010, dan 2015 tidak efektif, Tahun 2012 dan 2013 kurang efektif, Untuk tahun 2011 cukup efektif, untuk tahun 2014 sudah sangat efektif Karena nilai yang diperoleh sudah lebih dari 100%, dan dilihat dari rata-rata efektivitas kinerja keuangan periode opini *Disclaimer* dan WDP adalah 56.51%, 79% atau pemerintah tidak efektif dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah.

Rasio Efisiensi Daerah Berdasarkan perhitungan pada tabel 2 dan 3 di atas Efisiensi Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat pada tahun 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, dan 2015 tergolong tidak efisien karena nilai rasionya berada diatas 100%. Karena daerah memiliki rata-rata kinerja keuangan adalah 111.85%, 110.44%, hal ini dikatakan Tidak Efisien dalam menjalankan setiap kegiatan pemerintahan dan pemungutan pendapatan.

Rasio Aktivitas Berdasarkan perhitungan rasio aktivitas pada tabel 2 dan 3 pada periode opini *Disclaimer* dan WDP di atas nampak bahwa sebagian besar dana yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat masih digunakan untuk kebutuhan belanja rutin dari pada belanja pembangunan. atau memiliki rata-rata pada periode opini *Disclaimer* dan WDP Belanja rutin pemerintah sebesar 66.66% dan 58.83%. dan pada belanja Pembangunan periode opini *Disclaimer* dan WDP sebesar 32.65% dan 41.04%.



Rasio Indeks Kemampuan Rutin Berdasarkan perhitungan pada tabel 2 dan 3 pada periode opini *Disclaimer* dan WDP dari tahun 2008-2015 masuk dalam kategori sangat kurang, kemampuan pemerintah dalam membiayai pengeluaran rutin dalam melaksanakan kegiatan pemerintahanya, karena memiliki rata-rata pada periode *Disclaimer* sebesar 2.88% dan pada periode WDP sebesar 5.30%. kedua periode dikatakan sangat kurang karena memiliki rasio <80%.

Rasio Ketergantungan Berdasarkan perhitungan analisis rasio ketergantungan pada tabel 2 dan 3 pada periode opini *Disclaimer* dan WDP dari tahun 2008-2015 masuk dalam skala interval >50% yang berarti tingkat ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat dan propinsi sangat tinggi, karena memiliki rata-rata pada periode opini *Disclaimer* sebesar 98.03% dan pada periode opini WDP sebesar 97.19%. Kedua periode opini dikatakan sangat tergantung karena skala interval >50%.

## Pembahasan

Pada tabel 1 Paired Samples Test. Menunjukkan bahwa dalam uji hipotesis gabungan tujuh indikator rasio pada pemerintah kabupaten Halmahera barat hasil menunjukkan bahwa secara signifikan tidak berbeda kinerja keuangan periode opini *Disclaimer* dan WDP. Tidak berbeda tersebut bermakna PAD pada periode opini *Disclaimer* dan WDP memiliki kemampuan yang sangat kurang dalam membiayai pembangunan daerah. Hal ini terjadi karena PAD di Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat masih relative sangat kecil karena PAD <50% dalam membiayai pembangunan daerah. Selain itu partisipasi dan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak dan retribusi daerah masih sangat kurang sehingga menyebabkan PAD tidak memiliki andil besar dalam membiayai pembangunan daerah di Kabupaten Halmahera Barat.

Juga masih sangat tergantung pada bantuan dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi (Instruktif) periode opini *Disclaimer* dan WDP Kemandirian daerah selama delapan pada Pemerintah Kabupaten Halmahera barat masih tergolong rendah karena <50%. seharusnya kemandirian keuangan daerah harus melebihi 50% dalam membiayai pelaksanaan pembangunan.

Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat Periode opini *Disclaimer* dan WDP juga Tidak Efektif karena efektivitasnya di bawah 100% Hal ini disebabkan karena penerimaan dari sektor pajak dan retribusi daerah kurang dari tidak melebihi yang dianggarkan sebelumnya. Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat dapat dikatakan memiliki kinerja yang tidak baik dalam hal merealisasikan PAD yang telah direncanakan.

Efisiensi Keuangan Daerah Kabupaten Halmahera Barat periode opini *Disclaimer* dan WDP yang tergolong masih tidak efisien diakibatkan karena total belanja daerahnya masih lebih besar dari pada pendapatan daerahnya selama 8 tahun. Sehingga dapat dikatakan Kinerja Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat dalam hal ini masih kurang baik. Untuk kedepanya diharapkan Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat dapat meminimalisir jumlah belanjanya dengan disesuaikan pendapatanya. Sehingga kedepanya dapat terjadi peningkatan efisiensi belanja daerah.

Dan juga, pada belanja rutin pemerintah daerah pada periode opini *Disclaimer* dan WDP karena masih sangat tinggi yaitu >50%. sedangkan belanja pembangunan <50% yang berarti pemerintah hanya memfokuskan pada belanja pegawai dari pada belanja untuk sarana-prasarana fasilitas untuk pelayanan masyarakat. Seharusnya pemerintah daerah lebih memfokuskan untuk belanja pembangunan dari pada belanja rutin, agar masyarakat dapat merasakan dan menikmati setiap bantuan sarana-prasarana dari pemerintah daerah. karena apa yang menjadi milik rakyat harus diberikan pada rakyat. Indeks Kemampuan Rutin pemerintah kabupaten halmahera barat periode opini *Disclaimer* dan WDP sangat kurang kemampuannya keuangan daerah dalam mendukung otonomi daerah. seharusnya pemerintah memiliki indeks kemampuan rutin periode opini *Disclaimer* dan WDP >60% untuk mendukung otonomi daerah pemerintah kabupaten halmahera barat. Atau bermakna, pemberian opini dari BPK tidak mengakibatkan perbedaan kinerja keuangan pada pemerintah kabupaten Halmahera barat. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Pangalila (2014) yang menyatakan bahwa kinerja keuangan daerah yang beropini WDP dan beropini *Disclaimer* yang ada di sulut tidak menunjukkan adanya perbedaan.

Sejalan yang dilakukan oleh Muhammad Taufik (2014) yang menyatakan bahwa kinerja keuangan daerah yang beropini WDP tidak berbeda dengan dengan kinerja keuangan yang beropini WTP Pemerintah Kabupaten/kota di propinsi Aceh tahun 2011-2012.

## PENUTUP

### Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan maka dapat disimpulkan hal sebagai berikut : Dari hasil analisis uji analisis gabungan didapati bahwa tingkat signifikansi kinerja keuangan pemerintah kabupaten halmahera barat yang beropini *Disclaimer* dan kinerja keuangan yang beropini WDP tidak menunjukkan adanya perbedaan kinerja keuangan.

### Saran

Hasil penelitian diharapkan bagi Pemerintah daerah lebih khususnya Kabupaten Halmahera Barat supaya dapat meningkatkan PAD dan memperbaiki kinerja keuangan daerah. agar terwujudnya transparansi dan akuntabilitas kinerja keuangan., dengan mengali berbagai macam potensi sumber pendapatan daerah, misalnya Pendirian BUMD sektor potensial seperti seperti Pertambangan, Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perikanan, Perdagangan, Agronomi, Agroindustri dan agrowisata serta sektor Jasa. Bidang – bidang usaha dimaksud jika digarap dengan serius mampu mendorong peningkatan ekonomi masyarakat dan PAD. dan juga harus ada partisipasi dan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak dan retribusi daerah agar PAD daerah meningkat. Pemerintah daerah Halmahera Barat sebaiknya juga memberikan porsi lebih banyak pada belanja pembangunan agar masyarakat dapat menikmati setiap pembangunan fisik yang disediakan oleh pemerintah daerah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim. (2012). *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Edisi Ketiga. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Ni Ketut Erna Rahmawati (2016). *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2010-2012*
- Mahmudi. (2016). *Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta : UPP STIM YKPN
- Mardiasmo. (2011). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Mario Rainer Pangalila (2014). *Analisis Komparasi Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Kota Beropini WDP Dan Disclaimer Yang Ada Di Sulut.*
- Muhammad Taufik (2014). *Analisis Perbedaan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Periode Opini WDP dan Periode Opini WTP (Studi Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh Tahun 2011-2012)*
- Marchelino Daling (2013). *Analisis Kinerja Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara.*
- Yuni Wulan Dary (2016). *Analisis Perbedaan Kinerja Keuangan Pendapatan Asli Daerah Periode Opini Non WTP dan Periode WTP.(Studi Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh Tahun 2013-2014)*

- Wendy, Budiarto. (2012). Pengaruh Opini, Temuan Audit dan Gender Terhadap Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia Tahun 2008-2010. Skripsi. Universitas Indonesia.
- Wenny, Cherrya Dhia. 2012. Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten dan Kota Di Propinsi Sumatera Selatan. Jurnal Ilmiah STIE MDP, Vol. 2 (1): 39-51.
- Rahman, Naukoko, dan Londoh, (2014). Derajat desentralisasi fiskal atau otonomi fiskal daerah adalah kemampuan pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan PAD guna membiayai pembangunan daerah.
- Retno Dwijayanti (2013). Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Pemerintah Propinsi Se Indonesia.
- Singgih Riphath (2016). Causality Analysis Between Financial Performance And Human Development Index: (A Case Study Of Provinces In Eastern Indonesia).

